

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu)

Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: Eka.evita@gmail.com

Abstract: *Policy Implementation of Street Vendors Arrangement.* The existence of street vendors around the Batu square considered to be the cause of traffic congestion and disturb the beauty of the city. Along with construction of the Batu square project, the Government intends to make street vendors arrangement who selling around Batu square by relocate street vendors in one place, namely Batu Tourism Center (BTC). The purpose of this study is to describe and analyze the street vendors arrangement, policy implementation of street vendors arrangement, as well as the constraints faced in the policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center in Batu. This research uses descriptive qualitative approach. Collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study showed that policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center is unsuccessful implementation (implementation that does not work). This is because some of the problems and obstacles that most vendors choose to sell back all the way and leave BTC.

Keywords: *policy implementation, street vendors arrangement*

Abstrak: *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.* Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, penataan pedagang kaki lima*

Pendahuluan

Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin.

Hal ini membuat peluang kerja yang ada di perkotaan menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Akibatnya penduduk desa yang tidak

dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian” (www.kamusbesar.com, 2012).

Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima. Dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Kota Batu tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan selesainya proyek pembangunan alun-alun Kota Batu, maka kawasan sekitar alun-alun harus bersih dari pedagang kaki lima. Disamping itu juga dalam Keputusan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima ditetapkan beberapa kawasan bebas pedagang kaki lima yang salah satunya berada di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu. Sehingga para pedagang kaki lima yang semula berada di sekitar taman wisata alun-alun harus dipindah.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Tempat

relokasi ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Batu dengan pihak swasta yakni PT. ECKM yang bertindak sebagai penyedia lahan sekaligus pengelola tempat relokasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu. 2) Bagaimanakah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu. 3) Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu ?

Tinjauan Pustaka

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari kata kebijakan dan publik. Menurut Islamy (1991, h.20) kebijakan publik (*public policy*) adalah, “Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”. Pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat.

Suatu proses kebijakan, menurut Charles O. Jones (dalam Wahab, 2001, h.29) sedikitnya terdapat empat golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: a) golongan rasionalis; b) golongan teknisi; c) golongan inkrementalis; d) golongan reformis.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001, h.65), merumuskan proses implementasi sebagai: “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Menurut Wahab (2001, h.61) dalam proses implementasi kebijakan sering terdapat permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh. Gejala tersebut dinamakan sebagai *implementation gap*, yakni:

“Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.” (Andrew Dunsire dalam Wahab, 2001, h.61).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2001, h.61), bahwa:

“Kebijakan publik sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *non-implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), dan kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*).”

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Model ini mencoba menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu diantaranya:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap para pelaksana, dan
- 6) Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi sebuah kebijakan. Menurut Kurniawan, faktor-faktor tersebut diantaranya: a) Isi atau *content* kebijakan; b) *Implementator* dan kelompok target; c) Lingkungan (www.hykurniawan.wordpress.com, 2009).

C. Sektor Informal

Menurut Portes dan Walton (dalam Gilbert yang diterjemahkan oleh Anshori 1996, h.100), sektor informal dapat dikaitkan sebagai pensubsidi sektor formal; pekerja dengan upah rendah yang menghasilkan masukan yang rendah pula bagi sektor formal dan akan menyediakan barang-barang dan jasa yang murah bagi para pekerja di sektor formal.

D. Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah, “Penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak”.

E. Penataan Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan

kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011, h.246-253) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Pemerintah Kota Batu. Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah *Batu Tourism Center* (BTC), Diskoperindag Kota Batu, dan Satpol PP Kota Batu. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: fokus pertama yaitu Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu yang meliputi: a) Pertimbangan perumusan Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu; b) Koordinasi aktor dan stakeholder terhadap Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu. Fokus kedua yaitu Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu yang meliputi: a) lokasi implementasi; b) jumlah dan jenis pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kebijakan; c) kondisi dan potensi pedagang kaki lima; d) proses penataan. Dan fokus ketiga yaitu kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

Pembahasan

1. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada *Batu Tourism Center*

a) Pertimbangan Perumusan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kawasan alun-alun Kota

Batu sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagian besar dari pedagang kaki lima memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak. Gerobak-gerobak para pedagang kaki lima dibiarkan menumpuk di beberapa tempat di sekitar alun-alun Kota Batu sehingga sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Islamy (1991, h.20) bahwa kebijakan publik adalah, “Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Islamy di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, bersih, dan indah.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Sedangkan untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu dan Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.

b) Koordinasi aktor dan stakeholder terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Menurut Charles O. Jones (dalam Wahab, 2001, h.29) suatu proses kebijakan sedikitnya terdapat empat golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat. Keempat aktor tersebut meliputi golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis.

Dalam proses kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu, melibatkan golongan rasionalis dan golongan teknisi. Golongan Rasionalis ini identik dengan peran perencana dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu Pemerintah Kota Batu. Sebelum merumuskan kebijakan penataan, Pemerintah Kota Batu berusaha menganalisis semua permasalahan terkait pedagang kaki lima dan mencari alternatif terbaik sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait keberadaan pedagang kaki lima di Kota Batu.

Sedangkan yang termasuk dalam golongan teknisi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pembinaan bagi pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang untuk melakukan proses penertiban terhadap para pedagang kaki lima.

Kebijakan ini juga melibatkan pihak swasta yaitu PT. ECKM yang berperan sebagai penyedia lahan sebagai tempat relokasi sekaligus sebagai pengelola.

2. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Batu Tourism Center

a) Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Lokasi tempat usaha bagi para pedagang kaki lima memegang

peranan yang cukup penting. Kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung dengan pemilihan lokasi sebagai tempat berusaha. Pedagang kaki lima harus dapat melakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat agar kelangsungan usaha mereka terjamin.

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu, pedagang kaki lima yang semula berada di kawasan sekitar alun-alun akan dipindah ke *Batu Tourism Center* (BTC). Pemindahan pedagang kaki lima pada satu tempat ini diharapkan dapat membuat kawasan sekitar alun-alun terlihat bersih dan rapi. Disamping itu dengan adanya BTC, pembeli akan lebih mudah karena nantinya BTC akan dijadikan sebagai pusat kuliner, wisata belanja pakaian, dan aksesoris di Kota Batu. Sementara itu, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030, lokasi di belakang Ganesha tepatnya di Jl. Kartini memang dapat dibangun BTC karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

b) Jumlah dan jenis pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kebijakan

Pedagang kaki lima yang dipindah ke BTC berjumlah 300 PKL yang terdiri dari PKL makanan, PKL pakaian, dan PKL aksesoris. Untuk pembelian kios dan bedak yang ada di BTC, pedagang kaki lima mendapatkan bantuan uang muka dari Pemerintah Kota Batu. Penyaluran bantuan uang muka pembelian kios dan bedak dilakukan oleh Diskoperindag Kota Batu. Selanjutnya bantuan tersebut langsung diserahkan kepada pihak pengelola dan dijadikan sebagai angsuran pertama untuk pembelian kios atau bedak di BTC.

c) Kondisi dan potensi pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kebijakan

Sebagai Kota tujuan wisata, Kota Batu tentu sangat diminati oleh para pengunjung. Rmainya wisatawan yang berkunjung di Kota Batu membuat sektor informal, khususnya pedagang kaki lima berkembang sangat pesat. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Namun dari sekian banyaknya pedagang kaki lima yang baru, sebagian besar dari mereka masih berjualan di sekitar koridor jalan utama di Kota Batu. Diskoperindag sejauh ini masih melakukan pendataan dan memantau kegiatan pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan untuk penertiban pedagang kaki lima, Satpol PP sudah berkali-kali melakukan operasi penertiban. Namun sangat sulit untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut.

d) Proses penataan pedagang kaki lima

Dalam implementasinya, kebijakan ini mengalami perbedaan antara yang diharapkan sebelumnya dengan yang telah dicapai. Sebagaimana menurut Andrew Dunsire (dalam Wahab, 2001, h.61) hal ini disebut sebagai *implementation gap*.

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan *unsuccessful implementation* karena disebabkan pelaksanaannya yang jelek (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2001, h.61).

Ketidakberhasilan implementasi kebijakan ini dapat di-analisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang di-kembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001, h.70) yakni model proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Adapun variabel-variabel dalam model ini meliputi:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur dalam Perwali Kota Batu No. 18 adalah mewujudkan Kota Batu sebagai tempat tujuan wisata yang bersih dan nyaman. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah terciptanya kawasan sekitar alun-alun yang bersih, indah dan bebas dari pedagang kaki lima.

Memang setelah dilakukan penertiban, kawasan sekitar alun-alun bersih dari pedagang kaki lima dan PKL dapat dipindah ke BTC. Namun, beberapa bulan kemudian sebagian besar pedagang kaki lima memutuskan keluar dari BTC dan kembali memenuhi ruas jalan. Hal ini dilakukan karena BTC sepi akan pengunjung.

2) Sumber-sumber kebijakan

Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Kemudian pengaturan terkait tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan para PKL diatur dalam Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Disamping itu juga, Pemerintah Kota Batu membentuk tim terpadu guna menunjang kelancaran dan ketertiban dalam proses relokasi pedagang kaki lima yang tercantum dalam Keputusan Walikota

Nomor:180/83/KEP/422.012/2011 tentang pembentukan tim terpadu penanganan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) alun-alun Kota Batu Tahun 2011.

3) Ciri-ciri atau sifat badan/intansi pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001, h.65) proses implementasi didefinisikan sebagai: *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*. Berdasarkan definisi di atas, maka proses implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, proses implementasi juga dapat dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun swasta.

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC, proses implementasinya melibatkan Pemerintah dan pihak swasta. Dimana dari pihak Pemerintah dilimpahkan kepada dua instansi yang merupakan implementator dari kebijakan ini, yaitu Diskoperindag dan Satpol PP. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan pihak swasta, yakni PT. ECKM yang berperan sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola. Kerjasama Pemerintah Kota Batu dengan PT ECKM ini dilatarbelakangi karena keterbatasan dana Pemerintah. Oleh karena itu, melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghemat pengeluaran dan mengurangi beban Pemerintah.

Kerjasama dengan pihak swasta ini pada hakekatnya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, Pemerintah maupun pihak swasta. Dimana pihak swasta mendapatkan keuntungan berupa profit, kemudian masyarakat akan mendapat manfaat dengan terpenuhinya kebutuhan.

Sedangkan Pemerintah juga akan diuntungkan dengan keringanan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ditentukan oleh

kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kota Batu, Diskoperindag, Satpol PP, dan pihak swasta.

- 4) Komunikasi antar organisasi terkait Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC berkaitan erat dengan pembangunan alun-alun Kota Batu. Sebelum dilaksanakan pembangunan, dilakukan sosialisasi yang melibatkan paguyuban pedagang kaki lima, warga sekitar alun-alun, tokoh agama, dan tokoh-tokoh penting di Kota Batu. Sosialisasi ini dikomando oleh Diskoperindag dan Satpol PP.

Setelah diimplementasikan, sebagian besar pedagang kaki lima yang telah menempati BTC memutuskan untuk kembali berjualan di sepanjang jalan. Melihat hal tersebut Diskoperindag dan Satpol PP belum melakukan tindakan dan pedagang kaki lima masih dibiarkan berjualan di sepanjang jalan. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan masih belum efektif.

- 5) Sikap para pelaksana

Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima yang merupakan perwujudan kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta dihadapkan pada beberapa permasalahan.

Di antaranya pertama, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang tetap berjualan di sekitar alun-alun. Hal inilah yang kemudian membuat pedagang kaki lima yang sudah dipindah ke BTC memilih keluar dan kembali berjualan di sepanjang jalan.

Melihat uraian diatas, pedagang kaki lima menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu. Tetapi karena masih banyak pedagang kaki lima baru yang berjualan di sekitar alun-alun sehingga membuat pedagang kaki lima melakukan penolakan atas kebijakan relokasi ke BTC.

Kedua, pihak swasta selaku pengelola BTC dirasa tidak mampu mengelola BTC agar BTC ramai akan pengunjung. Sangat jarang sekali diselenggarakan acara-acara untuk menarik minat pengunjung. Selain kurangnya upaya dari pihak pengelola, Pemerintah Kota Batu juga kurang memberikan dukungan dalam hal mempromosikan BTC sehingga BTC kurang diminati dan tidak dikenal oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak pengelola dan Pemerintah Kota Batu kurang menunjukkan sikap memberikan dukungan atas kebijakan penataan pedagang kaki lima. Setelah relokasi dilakukan, Pemerintah Kota Batu tidak memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan tersebut dan terkesan melimpahkan kebijakan ini kepada pihak swasta. Padahal semestinya Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta harus tetap bekerjasama.

6) Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial

Kinerja implementasi kebijakan juga dapat dinilai dari sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan eksternal yang kurang kondusif. Setelah seluruh pedagang kaki lima direlokasi ke BTC, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang berjualan di

sekitar alun-alun. Jika seluruh pedagang kaki lima dapat ditertibkan dengan baik, maka implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima akan menjadi efektif.

3. **Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Batu Tourism Center**

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu masih dihadapkan pada beberapa kendala. Menurut Kurniawan (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi sebuah kebijakan, yaitu:

a) Isi atau *content* kebijakan

Isi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu memang sudah jelas, dan sudah tercantum baik dalam Perda maupun Perwali Kota Batu. Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap pedagang kaki lima masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan perasaan atau emosional. Sangat sulit untuk menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) *Implementator* dan kelompok target.

Pedagang kaki lima yang merupakan kelompok target, merespon kebijakan Pemerintah Kota Batu dengan baik meskipun pada awalnya mereka menolak kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya pedagang kaki lima bersedia direlokasi dan mendukung kebijakan Pemerintah. Namun, pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Batu bersama pihak pengelola kurang memberikan dukungan terhadap kebijakan ini sehingga membuat pedagang kaki lima

melakukan penolakan terhadap kebijakan ini.

c) Lingkungan

Jumlah pedagang kaki lima terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban.

Kendala yang lain adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Selain itu kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu untuk mematuhi peraturan yang berlaku masih sangat kurang.

Kesimpulan

1. Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban PKL di Kota Batu. Sedangkan kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Serta berdasar pada Keputusan Walikota Batu Nomor:180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.
2. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu

melibatkan Diskoperindag, Satpol PP, dan pihak swasta yakni PT. ECKM. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah gagal dan merupakan *unsuccessful implementation*. Hal ini disebabkan karena banyak bermunculan pedagang kaki lima baru di sekitar alun-alun sehingga BTC semakin sepi akan pengunjung. Selain itu Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan ini. Terkait permasalahan tersebut, komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada masih belum efektif.

3. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya: penertiban pedagang kaki lima masih dihadapkan pada kendala perasaan atau emosional. Disisi lain, jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban. Sementara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Disamping itu juga kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima.

Daftar Pustaka

- Deskripsi Sektor Informal** [Internet] Available from: <<http://www.kamusbesar.com>> [Accessed: 29 Desember 2012]
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan** [Internet] Available from: <<http://hykurniawan.wordpress.com>> [Accessed: 10 Oktober 2012]

- Gilbert, Alan dan Josep Gugler. (1996) **Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga**. Diterjemahkan oleh Anshori. Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Islamy, Irfan. (1991) **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/83/KEP/422.012/2011** tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005** tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012** tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima [Internet] Available from: <<http://www.kemendagri.go.id/produk hukum/2012/06/20/pedoman-penataan-dan-pemberdayaan-pedagang-kaki-lima>> [Accessed: 28 Desember 2012]
- Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011** tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Batu.
- Sugiyono (2011) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Cetakan Keempat belas. Bandung, Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2001) **Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.